

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aermadepa, 2024, *Penegakan Hukum Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Indonesia Tahun 2024*, Jambi, PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Akuba, Rusthamrin Haris, 2015, *Presiden Buatan Manusia: Memenangkan Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah dengan Pemasaran Politik*, Yogyakarta, Deepublish.
- Alaydrus, Anwar, 2023, *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*, Jakarta, Penerbit Adab.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2021, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok, PT RajaGrafindo Persada.
- Atikah, Ika, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Sukabumi, Haura Utama.
- Baharuddin, Tawakkal, 2017, *Modalitas Dalam Pemilukada: Bupati Perempuan Pertama di Sulawesi Selatan*, Jakarta, Gre Publishing.
- Bakti Setiawan, Dian, 2011, *Pemberhentian Kepala Daerah (Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia)*, Jakarta, Rajawali Press.
- Bawembang, Nopesius, 2024, *Buku Ajar Hukum Pemerintah Daerah*, Surabaya, Gema Edukasi Mandiri.
- Christo Sagala, 2021, *Perlindungan Hak Konstitusional di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Darmawan, Ikhsan, 2012, *Membongkar Problematika dalam Pemilukada*, Jakarta, Program Studi Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik FISIP UI.
- Dharma, Fitra, 2022, *Kinerja Pemerintah Daerah dan Political Budget: Pengaruhnya Terhadap Perolehan Suara Incumbent pada Pemilukada*, Jakarta, Penerbit NEM.
- Didik Suhariyanto, et al, 2023, *Politik Hukum Pemilu*, Jambi, PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Dhaniswara K Harjono, 2022, *Aspek Hukum Rangkap Jabatan pada Korporasi di Indonesia*, Jakarta, UKI Press.
- Gun Gun Heryanto, 2024, *Ragam Persoalan Komunikasi Politik Indonesia*, Jakarta, IRCiSoD.

- Irmam, Muhammad Aqil, 2016, *Demokrasi Muka Dua*, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia.
- KPK Republik Indonesia, 2009, *Panduan Penanganan Konflik Kepentingan bagi Penyelenggara Negara*, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Kartiko, Achmad, 2025, *Intelijen Keamanan dan Politik Identitas: Mengawal Demokrasi (Strategi Intelligence-Led Policing pada Pemilu 2014 dan 2019)*, Banda Aceh, USK Press.
- Kenedi, John, 2017, *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Kristiawanto, 2022, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Lestari, Susilo, 2025, *Pemberlakuan Legalitas Tanah Gewijzigde Grondkaart Pasca Nasionalisasi*, Bogor, Penerbit K-Media.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press.
- Nugroho, Riant, 2020, *Public Policy 6 – Edisi Revisi*, Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Sigit Sapto, et al, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Madiun, Oase Pustaka.
- Oksidelfa Yanto, 2020, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Bandung, Pustaka Reka Cipta.
- Rahayu, Ani Sri, 2022, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Rahman Tahir, 2025, *Populisme Agama dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Medan, UMSU Press.
- Shiddiq Armia, Muhammad, 2022, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Banda Aceh, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Siahaan, Maruarar, 2022, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Edisi Kedua)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Tarigan, Ridwan Syaidi, 2024, *Konstitusi dan Kekuasaan Studi Kasus dalam Hukum Tata Negara*, Jakarta, Ruang Karya Bersama.
- Tarigan, Ridwan Syaidi, 2024, *Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Daerah Serentak*, Jakarta, Historie Media.

Widiarty, Wiwik Sri, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Publika Global Media.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024

PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU/XXII/2024

Surat Tugas Partai Golkar Nomor: Sprin/1297/DPP/Golkar/XI/2023

C. Skripsi, Thesis, Jurnal, dan Artikel Ilmiah Lainnya

Abdussamad Gusti M. Ardi, 2023, “Korupsi Politik Terlahir Dari Sistem Pemilihan Umum Menggunakan Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia”, *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol. 11, No. 1, hlm. 62-77.

Abidin Pakpahan, Zainal, 2019, “Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD Sebagai Implementasi Pelaksanaan Sistem Demokrasi Pancasila”, *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, Vol. 5, No. 2, hlm. 161-185.

Ade Kosasih, 2018, “Menakar Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Demokratis”, *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 1, hlm. 21-29.

Ahmad Felani, 2025, “Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi”, *Jurnal Sasi*, Vol. 25, No. 1, hlm. 72-83.

Ananta Saragih, Andre Dosdy, 2017, “Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus dalam Pemilu Serentak”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 5, No. 3, hlm. 41-59.

- Apriadi, 2023, "Problematika Kotak Kosong Pada Satu Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan.
- Aqhamta Hukma Arsyah, 2024, "Pelanggaran Kode Etik Rangkap Jabatan Penyelenggara Pemilu", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN KH Abdurrahman Wahid.
- Arifin Firdaus, 2025, "Mengintegrasikan Hukum Pemilu", *Rio Law Jurnal*, Vol. 6, No. 1, hlm. 194-204.
- Assyayuti Mazdan Maftukha, 2022, "Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 2, hlm. 281-292.
- Aisyah Oktavia Wanis, 2019, "Kedudukan Akta dan Akibat Hukum Terhadap Notaris yang Melakukan Rangkap Jabatan", *ACTA DIURNAL*, Vol. 3, No. 1, hlm. 24-30.
- Botutihe, Darwin, 2024, "Politik Hukum Pemenuhan Hak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Christine ST Kansil, 2024, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik", *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 4, hlm. 10-17.
- Darwin Botutihe, 2024, "Politik Hukum Pemenuhan Hak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Dewanto Wishnu, 2017, "Implementasi Sistem Demokrasi Pancasila", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa.
- Elvira Rosianti Elshi, 2024, "Kewenangan DPRD dan Kepala Daerah", *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 2, No. 2, hlm. 63-82.
- Fahmi Khairul, 2010, "Prinsip Kedaulatan Rakyat", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 3, hlm. 129-138.
- Faturrohman Rama Raihan, 2025, "Limitasi Hak Mengundurkan Diri Calon Anggota Legislatif Terpilih", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 2, hlm. 20-37.
- Gotfridus Goris Seran, 2019, "Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 3, hlm. 657-677.
- Janpatar Simamora, 2011, "Eksistensi Pemilukada", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 1, hlm. 222-236.
- Kartina, 2024, "Rangkap Jabatan Kepala Desa dan Camat", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

- Lita Tyesta Addy Listiya Wardhani, 2020, “Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, hlm. 305-312.
- Mubarak Husni, 2025, “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024”, *Constitution Journal*, Vol. 4, No. 1, hlm. 21–44.
- Putra, 2019, “Hak Politik Penyandang Disabilitas”, *Jurnal HAM*, Vol. 10, No. 2, hlm. 161-169.
- R. Siti Zuhro, 2018, “Demokrasi, Otonomi Daerah dan Pemerintahan Indonesia”, *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 10, No. 1, hlm. 10-26.
- Rahmatullah Arham, 2024, “Juridical Analysis of the Decision of the Constitutional Court”, *Al-Ahkam Addariyah*, Vol. 1, No. 2, hlm. 194-210.
- Sarbaini, 2020, “Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah”, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 1, hlm. 107-116.
- Umaima Wahid, 2013, “Perempuan dan Kekuasaan Politik”, *Jurnal Komunikasi*, Vol. 29, No. 1, hlm. 73-87.
- Yasser Arafat, 2022, “Pilkada Antara Pertarungan Gagasan dan Perebutan Kekuasaan”, *Al-Ittihad*, Vol. 8, No. 2, hlm. 24-38.